



JURNAL

**ANALISIS PERAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK DI DEWAN PIMPINAN
CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPC PDI P) KOTA CIREBON**

Oleh: Yogi Maulana Malik

NIM: D2B009046

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Pembimbing 1: Dra. Puji Astutu, M.Si

Pembimbing 2: Neni Marlina, S.Ip, M.Si

Alamat: Jl. Gn Bromo D VII No.79 Perumnas, Kota Cirebon

Email: yogimaulana850@gmail.com HP: 081312007685

ABSTRAK

Issue mengenai masalah gender merupakan issue yang sejak dahulu sudah ada baik di Indonesia maupun di negara lain, pada hakikatnya issue gender merupakan issue yang menuntut untuk kesetaraan hak antara kaum laki-laki dan perempuan, gender menjadi aspek dominan dalam politik, dalam relasi kelas, golongan usia maupun etnisitas, gender juga terlibat di dalamnya. Sejak tahun 2002 isu peningkatan jumlah perempuan untuk ikut terlibat di dunia politik sudah mulai di sosialisasikan hingga pada akhirnya pada pemilu 2004 keterwakilan jumlah perempuan dalam dunia politik sudah mulai dinaikan hingga 30% di dalam parlemen sampai sekarang.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan narasumber dan studi pustaka yang mendukung dengan penelitian ini. Lokasi penelitian yang diambil adalah di kantor sekretarian DPC PDI P Kota Cirebon, Kantor Fraksi PDI P Kota Cirebon, dan di rumah para kader.

Dalam penelitian ini mencakup dua pembahasan yaitu melihat bagaimana peran perempuan di dalam kepengurusan dan melihat bagaimana proses pencalonan legislatif yang berlangsung apakah sudah responsif gender atau belum. Pembahasan peran perempuan mencakup tingkat peran kader perempuan dalam kepengurusan partai sedangkan pembahasan mengenai proses pencalonan legislatif mencakup alur proses pencalonan kader perempuan dari tingkat bawah sampai atas.

Kesimpulan dari penelitian ini, pertama rumusan visi dan misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara umum sangat berpihak kepada perempuan karena tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, kedua sebagai respon dari kebijakan affirmative DPP mengeluarkan surat keputusan yang mewajibkan dalam proses pencalonan harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan hal ini menunjukkan bahwa partai sangat responsif terhadap kebijakan tersebut, ketiga dalam menjalankan perannya di dunia politik kader perempuan mengalami beberapa hambatan seperti hambatan psikologi, hambatan kultural dan hambatan ekonomi.

ABSTRACT

issue of gender is an issue that since the agreement had been made both in Indonesia and in other countries, in essence the issue of gender is an issue that demands for equal rights between men and women, gender is a dominant aspect in politics, in relation class, age group or ethnicity. Since 2002 the issue of increasing the number of women to become involved in the political world has begun socialized until finally in the 2004 elections the representation of women in politics has begun to be increased to 30% in Parliament until now.

The methodology used in this study is a qualitative research methodology. In this research, data collection techniques used were interviews with sources and literature that support to this research. The location of research undertaken is at the secretariat office PDI P Cirebon, PDI-P faction Office of Cirebon, and at the homes of volunteers.

In this study include two discussion is to see how the role of women in the management and see how the legislative nomination process that took place whether or not gender responsive. Discussion on the role of women include the level of the role of women in the management cadre of the party, while the discussion on legislative nomination process includes female cadres nomination process flow from the bottom to the top.

The conclusion of this study, the first formulation of the vision and mission of the Indonesian Democratic Party of Struggle in general very focused on women because there is no difference between men and women, the second in response to the policy of affirmative DPP issued a decree mandating the nomination process must include 30% representation of women, this shows that the party is very responsive to the policy, the third in performing its role in world politics cadre of women experience some psychological barriers such as barriers, cultural barriers, and economic barriers.

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Issue mengenai masalah gender merupakan issue yang sejak dahulu sudah ada baik di Indonesia maupun di negara lain, pada hakikatnya issue gender merupakan issue yang menuntut untuk kesetaraan hak antara kaum laki-laki dan perempuan, hal tersebut sebenarnya adalah hak dari setiap warga negara karena baik kaum laki-laki dan perempuan merupakan satu warga negara yang sama dan dilindungi oleh konstitusi Negara. Dalam konsep hukum nasional sudah merumuskan apa makna kesetaraan gender, seperti diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dimana dinyatakan bahwa : Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Selama ini banyak anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak cocok untuk dapat berkiprah di dunia politik, karena perempuan dianggap lebih memakai perasaan dalam mengambil keputusan

sehingga tidak cocok dalam pengambilan keputusan politik, konstruksi pikiran masyarakat inilah yang membuat banyak perempuan dengan kapasitas dan kapabilitas tinggi tidak mendapat tempat dalam dunia politik.

Penelitian ini mengambil obyek studi tentang peran perempuan dalam partai politik di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI P) Kota Cirebon dan melihat bagaimana proses pencalonan legislatif pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI P) Kota Cirebon. Objek studi dari penelitian ini di kantor sekretariat DPC PDI P Kota Cirebon, Kantor Fraksi PDI P Kota Cirebon, dan rumah para kader.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, dan juga untuk mempermudah penulis dalam melakukan kajian dalam hal ini, maka di rasa perlu adanya suatu rumusan masalah yaitu: bagaimanakah dalam kepengurusan partai dan bagaimana kontribusi perempuan dalam setiap kegiatan politik partai

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji dalam rumusan masalah tersebut di atas, yaitu: Untuk mengetahui keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik serta pencalonan legislatif dalam pemilu 2014 dan Untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam setiap kegiatan politik yang dilakukan oleh partai.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Ada beberapa alasan yang menjadi pendorong penulis untuk mengangkat tema penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan saat ini khususnya mengenai permasalahan gender dan partisipasi politik perempuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat pengetahuan kepada pembaca khususnya, masyarakat umum dalam memahami permasalahan gender dan partisipasi politik perempuan.

1.5 METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dalam penelitian sehingga diharapkan dengan menggunakan metode deskriptif ini akan mampu mengupas dan menggambarkan dengan jelas apa yang terjadi di dalam lokasi penelitian.

2) Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini : Wawancara atau *interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dengan responden dan Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan literature yang sesuai dengan penelitian.

3) Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yaitu mengenai “Peran Perempuan Dalam Kepengurusan Partai : Studi Kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Cirebon maka penelitian ini dilakukan di sekretariat DPC PDIP Kota Cirebon, Kantor Fraksi DPRD Kota Cirebon PDI P, serta di rumah para kader partai.

4) Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan secara sistematis terhadap data yang diperoleh agar mudah dipahami oleh pembaca, Cara analisis data dalam penelitian ini adalah : Teknik analisis menggunakan analisis kualitatif model Miles dan Huberman dan analisis spasial. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivis dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*) (Milles, 1984).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a) Kader Perempuan Dalam Kepengurusan Partai

Hak konstitusional warga negara Indonesia yang juga merupakan hak asasi manusia telah diakomodir secara jelas dalam UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Sebagai dasar hukum tertinggi tentu saja aturan ini memayungi segala perundangan di bawahnya.

Dalam menentukan kepengurusan pengurus, PDI P tidak mempermasalahkan laki-laki atau perempuan, yang penting dia memiliki ideologi yang sesuai dengan platform partai karena banyak juga yang menjadi pimpinan partai di daerah akar rumput seperti yang dijelaskan oleh sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon. *“...sama sekali tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan struktural asalkan dia memiliki ideologi yang sesuai dengan platform partai kenapa tidak...”* (Wawancara pada tanggal, 01 Agustus 2016)

b) Perempuan Dalam Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah suatu cara untuk menyeleksi warga negara untuk

dijadikan calon-calon pemimpin, partai politik berperan penting dalam menentukan proses ini karena partai politik lah yang berhak untuk untuk menyeleksi orang yang memiliki bakat dalam bidang politik baik dari internal partai maupun dari eksternal partai. Fungsi rekrutmen politik sangatlah penting bukan hanya dari segi legitimasi kewenangan, tetapi juga untuk menjamin kualitas kepemimpinan bangsa pada berbagai lembaga kenegaraan baik di pusat maupun di daerah agar orang-orang yang di rekrut nantinya memiliki kualitas untuk melaksanakan jabatan itu.

c) **Partisipasi Kader Perempuan Dalam Kegiatan Partai Politik**

Keterlibatan kader atau anggota di partai politik merupakan salah satu syarat untuk mencalonkan diri baik menjadi eksekutif maupun menjadi legislatif. Penempatan posisi perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya masyarakat dimana posisi perempuan ditempatkan di wilayah domestik sedangkan posisi laki-laki cenderung di wilayah publik. Seperti yang terlihat dalam struktur kepengurusan DPC PDI P Kota Cirebon dimana posisi perempuan hanya berada di posisi wakil ketua dan wakil sekretaris. Menurut Fitriya Pamungkaswati bahwa

kurangnya keterlibatan perempuan untuk menyuarakan aspirasi menjadi salah satu penyebab mengapa kader perempuan di DPC PDI P Kota Cirebon dipandang sebelah mata oleh kaum laki-laki, perempuan seharusnya bisa lebih proaktif untuk menyuarakan kepentingannya karena perempuan jauh lebih bisa memahami apa keluh kesah masyarakat secara riil ketimbang laki-laki. Akan tetapi menurut sekretaris DPC PDI P Kota Cirebon bahwa kader perempuan di DPC PDI P Kota Cirebon sangat baik dalam menjalankan roda organisasi dan aktif pada setiap acara yang digelar baik dari DPP, DPD, maupun dari DPC sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kader perempuan di DPC PDI P Kota Cirebon cukup mewarnai pergerakan partai.

d) **Hambatan Perempuan Partai Politik**

Kehadiran perempuan dalam partai politik tentu memberikan efek yang cukup berbeda dalam dunia perpolitikan di tanah air, akan tetapi dalam menjalankan perannya di politik kaum perempuan mengalami beberapa hambatan di dalam menjalankan perannya. Secara umum terdapat 3 hambatan yang dialami kaum perempuan dalam menjalankan perannya yaitu hambatan kultur sosial masyarakat, hambatan psikologis, dan hambatan ekonomi. Di PDI Perjuangan hambatan kultur sosial yang

dihadapi adalah masih adanya pandangan masyarakat kota Cirebon bahwa suatu keanehan apabila seorang perempuan aktif dalam kegiatan partai politik, bagi mereka seharusnya kaum perempuan hanya perlu fokus dalam urusan rumah tangga saja tidak perlu merambah ke dalam dunia politik. Pandangan seperti itulah yang menyebabkan sulitnya kader perempuan untuk mampu berkembang dalam dunia politik, pandangan seperti itu juga yang menyebabkan rendahnya calon legislatif perempuan yang ikut bertarung dalam pemilu 2014 lalu. Hambatan psikologis ini juga masih dirasakan oleh kader dan anggota perempuan untuk dapat bersaing dalam pengambilan keputusan di partai maupun dalam pencalonan legislatif pada pemilu 2014 kemarin, mereka masih merasa kurang percaya diri, takut, dan segan untuk bersaing dengan laki-laki. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan masalah ekonomi masih menjadi hambatan bagi kaum perempuan dalam berperan baik untuk pengambilan keputusan strategis maupun untuk bersaing dalam pemilu karena tentu dibutuhkan uang yang tidak sedikit untuk dapat bersaing dalam suatu pemilu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

- a) Rumusan visi dan misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara umum sangat berpihak kepada perempuan karena tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, bahkan sebagai bentuk keseriusan dalam menangani masalah perempuan PDI Perjuangan membentuk suatu badan yang khusus untuk mendengar aspirasi dan mengurus masalah perempuan yaitu badan pemberdayaan perempuan dalam struktur organisasinya.
- b) Sebagai respon dari kebijakan afirmatif DPP mengeluarkan surat keputusan yang berbunyi “*Seluruh proses penjaringan, penyaringan, dan penetapan yang dilakukan oleh struktur partai pada tingkatannya didalam melakukan penjaringan dan penyaringan caleg DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI dilakukan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)*”. Hal ini menunjukkan bahwa Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan sangat melindungi hak politik seluruh warga Negara baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan tanpa ada pengecualian.

- c) Tata cara pencalonan anggota legislatif dimulai dengan tahap penjangkaran, dimana ada dua tahapan dalam melakukan penjangkaran bakal calon anggota legislatif, yaitu Rekrutmen bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh struktur partai melalui DPD, DPC, PAC, atau ranting partai yang bersangkutan dan Pendaftaran langsung anggota partai yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ke struktur partai baik ke DPD, DPC, PAC, atau ranting partai.
- d) Dalam menjalankan perannya di dunia politik, kader perempuan di DPC PDI P Kota Cirebon mengalami beberapa hambatan yaitu hambatan kultural, hambatan psikologi, dan hambatan ekonomi.

diperbaiki dan menjadi saran dari peneliti kepada DPC PDI P Kota Cirebon agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk kedepannya. Beberapa saran dan masukannya adalah sebagai berikut :

- a) Dalam rangka meningkatkan kualitas kader perempuan, maka partai politik wajib melakukan pendidikan politik yang berjenjang agar para kader dapat memahami platform partai secara komprehensif.
- b) Memperkuat basis akar rumput di tingkatan PAC dan Ranting untuk merekrut dan mendidik kader dan anggota perempuan.
- c) Partai politik harus lebih meningkatkan kepekaan terhadap kepentingan kaum perempuan dalam proses pembuatan kebijakan di internal partai.
- d) Memaksimalkan bidang pemberdayaan perempuan dalam struktural partai supaya kader perempuan dapat melakukan pergerakan politik di tengah masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka ada beberapa hal yang harus

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Astrid, 2009, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Jakarta, Pancuran Alam.
- Arifin, Rahman. 2002, *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional*, Surabaya, SIC.
- Budiardjo, Miriam. 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 2002, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta, Gramedia.
- Fakih, Mansour. 1999, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- _____, 2003, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Gaffar Affan, 1998, *Merangsang Partisipasi Politik Rakyat*, Jakarta, Pustaka Cidesindo.
- Koirudin. 2004, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Karya.
- Mujibur Rahman Khairul Muluk, 2007, *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Notopuro, Harjito, 1984, *Peranan Wanita dalam Masa Pembangunan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2008, *Gender dan Administrasi Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- _____. 2011, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Prihatinah, Tri Lisiani. 2010, *Hukum dan Kajian Gender*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sukarna. 1981, *Sistem Politik*, Bandung, Alumni.
- Samuel P. Huntington & John M. Nelson, 1990, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta, Rineka Cipta.

